



KPK GELEDAH 8 LOKASI TERKAIT KASUS DUGAAN SUAP BUPATI PAKPAK BHARAT

KPK melakukan penggeledahan di delapan lokasi yang terkait dengan kasus dugaan suap Bupati Pakpak Barat Remigo Yolando Berutu. Lokasi yang digeledah berada di Medan dan Pakpak Bharat, Sumatera Utara.

“Selama dua hari, Senin-Selasa, 19-20 November 2018, dalam proses penyidikan suap terhadap Bupati Pakpak Bharat, KPK melakukan penggeledahan di delapan lokasi di Medan dan Kabupaten Pakpak Bharat,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (21/11/2018).

Lokasi yang digeledah di Medan ialah rumah tersangka David Anderson Karosekali (Kepala Dinas PUPR Pakpak Bharat), rumah Remigo, serta kantor dan rumah tersangka Hendriko Sembiring (swasta). Kemudian, lokasi yang digeledah di Pakpak Bharat ialah kantor Bupati Pakpak Bharat, kantor Dinas PUPR Pakpak Bharat, rumah di Desa Salak 1, dan rumah tersangka Hendriko. Dari delapan lokasi itu, KPK menemukan dan menyita sejumlah

barang, dari rekaman CCTV, ponsel, dokumen, hingga bukti transaksi. KPK juga menemukan uang Rp 55 juta di kantor Bupati Pakpak Bharat, yang diduga berasal dari salah satu kepala dinas di sana.

“Dari penggeledahan tersebut, disita dokumen proyek, barang bukti elektronik berupa HP, CCTV, dan dokumen transaksi perbankan. KPK juga menemukan uang Rp 55 juta dari kantor Bupati yang kami duga berasal dari salah satu kepala dinas di Pakpak Bharat dan terkait dengan perkara ini,” ujar Febri.

Dia juga mengatakan ada dugaan uang suap yang diterima Remigo berasal dari sejumlah pihak yang disalurkan lewat kepala dinas. Febri mengingatkan agar para kepala dinas yang pernah disuruh meminta uang ke pihak lain agar kooperatif dan mengembalikan uang yang telah diterima.

“Kami imbau agar para Kepala Dinas yang pernah menerima uang atau disuruh meminta uang kepada pihak lain agar bersikap kooperatif dan mengembalikan uang tersebut ke KPK. Sikap kooperatif tersebut tentu akan kami hargai,” ucapnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Remigo, David, dan Hendriko. Menurut KPK, Remigo diduga menerima uang Rp 550 juta terkait dengan proyek di Dinas PUPR Pakpak Bharat.

Duit itu diduga diterima Remigo secara bertahap. KPK juga menyebut uang itu, salah satunya, diduga digunakan Remigo untuk ‘mengamankan’ kasus yang menjerat istrinya.



KPK OTT BUPATI PAKPAK BHARAT SUMATERA UTARA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Minggu (18/11/2018). Kali ini, KPK menangkap Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara Remigo Yolando Berutu.

“Benar ada kegiatan dini hari tadi di Medan dan Jakarta,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo kepada awak media, Minggu siang.

Selain Bupati, petugas KPK juga menangkap Kepala Dinas, Pegawai Negeri Sipil dan pihak swasta. Sebanyak dua orang ditangkap di Jakarta dan empat orang di Medan.

Terpisah, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyebut OTT itu

terkait dugaan suap proyek di Dinas PUPR Pakpak Bharat. Namun, Febri tak menjelaskan detail proyek yang dimaksud.

“Ada dugaan suap terkait proyek dinas PU di Pakpak Bharat,” ujarnya.

Saat ini, pihak yang ditangkap di Jakarta sudah berada di Kantor KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Sedangkan, empat orang yang ditangkap di Medan, termasuk Bupati Remigo Yolando Berutu telah dibawa ke kantor KPK di Jakarta melalui penerbangan pada pukul 11.00 WIB tadi.



Kunker ke Samosir, Danrem 023/KS Gagas Pembentukan Satgas Bencana Alam

Komandan Korem (Danrem) 023/Kawal Samudera, Kolonel Infanteri

Mohammad Fadjar menggagas pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Bencana Alam di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

Ide pembentukan Satgas Bencana Alam ini disampaikan Kolonel Inf Mohammad Fadjar di sela-sela kunjungan kerja Danrem 023/KS beserta Ketua Persit KCK Koorcabrem 023 PD I/BB di Rumah Dinas Bupati Samosir, Rabu malam (14/11/2018).

Dalam pertemuan dengan Bupati Samosir Drs Rapidin Simbolon, yang didampingi Waka Polres Samosir Kompol Rosmana, serta Danramil 03/Pangururan Kapten Inf D Panjaitan, Danrem 023/KS menjelaskan, pembentukan Satgas Bencana Alam di Samosir ini sebagai tindak lanjut terhadap dukungan menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata internasional, sesuai dengan keputusan Presiden.

“Kami (TNI) akan mendukung penuh tugas-tugas di daerah, apalagi ini menyangkut keputusan Presiden RI tentang destinasi Danau Toba,” jelas Danrem.

“Untuk itu, saya meminta agar dibentuk Satgas Bencana Alam, sehingga dengan keberadaan satgas kita bisa bersama-sama bekerja dalam penanganan bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi di Kabupaten Samosir,” ucap Danrem 023/KS.

Dalam sambutannya, Bupati Samosir Rapidin Simbolon menyampaikan, bahwa selama ini hubungan antara TNI-Polri dan Pemkab Samosir sudah sangat baik dan terbina dengan harmonis. “Selama ini, kami di Kabupaten Samosir selalu bahu-membahu dalam menangani setiap bencana, seperti kebakaran hutan yang

kami tangani dengan cara bekerja sama untuk memadamkan apinya. Karenanya, di kesempatan ini, kami menyampaikan sangat berterima kasih kepada para Danramil yang ada di Kabupaten Samosir yang telah membantu dalam pemadaman apabila terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)," ujar Bupati.

Dalam pertemuan yang penuh dengan suasana keakraban itu, Danrem 023/KS dan Ketua Persit KCK Koorcabrem 023 PD I/BB, mendapat kehormatan pemakaian ulos dari Bupati didampingi Ketua PKK Kabupaten Samosir, Ibu Rapidin Simbolon. Acara diakhiri dengan saling tukar cinderamata antara Danrem 023/KS dengan Bupati Samosir.



**Aliansi Pers dan LSM Nias
Menyurati Kapolda Sumut**

Terkait Dugaan Kriminalisasi Jurnalis

Aliansi Pers, LSM dan Aktivistis Bersatu Nias Indonesia (Apresiasi) menyurati Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Sabtu, 09/11/2018 meminta perlindungan hukum terhadap dugaan kriminalisasi Jurnalis moltoday.com Yonatan Gea atas kasus dugaan pemerasan.

Yonatan Gea dilaporkan ke Polres Nias oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara, Gatimbowo Lase, Senin 05/11/2018.

Aliansi Pers, LSM dan Aktivistis Bersatu Nias Indonesia (Apresiasi) mensinyalir adanya pengkondisian mengarah kriminalisasi terhadap Yonatan Gea. Atas dasar itu, Aliansi menyurati Kapolda Sumut untuk memberikan perlindungan hukum jurnalis media moltoday.com tersebut dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Dalam suratnya, Aliansi juga meminta agar pihak Kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan Agusmulia Tafonao dengan nomor STPLP 307/XI/2018/NS terkait dugaan penyuapan dan/atau gratifikasi yang diduga dilakukan oleh GL terhadap jurnalis moltoday.com di Cafe Lasara Poin.

Kordinator Aliansi, Kristiani Wa'u alias Tian dalam konperensi pers Senin sore (12/11) didepan para awak media beberapa media

di Gunungsitoli mengatakan, “Kita yang bergabung dalam Aliansi Pers, LSM, Aktivis Bersatu Nias Indonesia(Apresiasi) telah melayangkan surat kepada Kapoldasu untuk meminta perlindungan hukum serta meminta juga Bapak Kapoldasu agar pihak Polres Nias segera juga melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan Agusmulia Tafona’o terhadap GL”, tegasnya.

Tian menambahkan, “Sepertinya penyelidikan dan penyidikan atas kasus dugaan penyuapan dan/atau Gratifikasi yang diduga dilakukan oleh GL tidak berjalan, namun penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus dugaan pemerasan terhadap jurnalis media moltoday.com dilakukan secara marathon. Sehingga ada dugaan pengkodisian terhadap jurnalis di Pulau Nias ini”, tegas Tian yang juga dikenal sebagai aktivis muda.

Tian berharap kepada Kapolda Sumut agar kasus ini ditangani dengan teliti sehingga tidak terkesan adanya dugaan kriminalisasi terhadap jurnalis di wilayah kepulauan Nias.



Koruptor 105 Milyar ditangkap Kejaksaan

Setelah 5 tahun kabur dan ditetapkan sebagai buronan dan masuk DP0 (Daftar Pencarian Orang), Faisal mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Deli Serdang Sumut, akhirnya berhasil ditangkap oleh Kejaksaan.

Faisal adalah terdakwa korupsi dana APBD Deli Serdang sebesar Rp 105 miliar.

Berikut kronologi kasus Faisal, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Deli Serdang itu, hingga akhirnya tertangkap :

1 Juni 2012

Jaksa menahan Faisal

27 Juli 2012

Berkas Faisal dilimpahkan ke PN Medan dan perpanjangan penahanan dilanjutkan.

9 Januari 2013

Majelis hakim yang mengadili Faisal mengubah penahanan Faisal dari penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Rumah.

12 Februari 2013

Ketua Pengadilan Tinggi (PT) memperpanjang masa Tahanan Rumah.

21 Agustus 2013

PN Medan menjatuhkan hukuman ke Faisal selama 18 bulan penjara.

20 Desember 2013

PT Medan memperberat hukuman Faisal menjadi 12 tahun penjara.

Faisal tidak bisa dieksekusi dan namanya masuk DP0.

15 Februari 2016

Mahkamah Agung (MA) menguatkan hukuman Faisal selama 12 tahun penjara.

Dengan majelis hakim Syarifuddin, anggota MS Lumme dan Syamsul Rakan Chaniago.

9 November 2018

Faisal ditangkap dirumahnya di Jalan Yos Sudarso Ware House No 313, Mekar Sentosa, Rambutan, Kota Tebing Tinggi, dan dijebloskan ke penjara.



Kapolda Sumut Warga Kehormatan Nias Selatan

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto dinobatkan menjadi warga kehormatan di Desa Bawamataluwo, Teluk Dalam, Nias Selatan. Penobatan berlangsung saat orang nomor satu di Polda Sumut itu melakukan kunjungan kerja.

Penobatan ditandai dengan upacara adat dan pertunjukan tarian perang Adat Nias Selatan pada hari Rabu kemarin (7/11).

Kapolda menyampaikan sangat berterimakasih atas penobatan warga kehormatan yang diberikan dan dipercayakan kepada dirinya. Warga Nias sangat toleran dan menghargai perbedaan.

“Saya sangat berterimakasih atas kepercayaan ini. Saya berharap warga Nias selalu menjaga tradisi dan kebudayaan ini agar menjadi alat pemersatu bangsa,” katanya.



Selain Kapolda Sumut dan Ketua Bhayangkari Polda Sumut Evi Agus Andrianto yang dinobatkan, tokoh adat juga memberikan kesempatan kepada pejabat utama Polda Sumut untuk memakai baju adat Nias Selatan.

Kapolda juga meminta masyarakat Nias untuk mensukseskan pelaksanaan Pilpres dan Pileg dengan menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai dan kondusif.

Selain itu, Ia juga menyampaikan agar masyarakat menjauhi narkoba dan miras yang dapat merusak generasi bangsa.



“Pilpres dan Pileg harus aman dan damai, masyarakat jangan mau diadu domba dengan informasi hoax yang disebar oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,” ucap Kapolda.

Dihari kedua kunjungan, Kapolda Sumut dan rombongan melakukan pemantauan terhadap pulau terluar dengan menggunakan kapal cepat.



Pesona Danau Sicike-cike

Selain Tao Silalahi yang termasuk dalam kawasan Danau Toba, Kabupaten Dairi juga memiliki Potensi Pariwisata Taman Wisata Alam (TWA) Danau Sicike-cike, yang terletak di Kecamatan Parbulan, sekitar 20 km dari Sidikalang, ibukota Kabupaten Dairi.

Pemkab Dairi mulai gencar mempromosikan Danau Sicike-cike sebagai destinasi wisata baru. TWA Danau Sicike-cike yang masuk dalam wilayah hutan lindung dengan luasan ratusan hektar tersebut, digadang-gadang sebagai destinasi wisata potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat serta menyanggah pendapatan asli daerah.

Sambil promosi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemkab Dairi, Ir. Samuel Tua Manik mengatakan, "TWA Si Cike Cike dengan luas sekitar 575 hektar, memang tidak ada duanya. Pokoknya komplitlah sudah, mulai dari potensi nilai historis Si Pitu Marga Pakpak sebagai Wisata Budaya, eko wisata/pesona alam, kekayaan hutan yang ditopang tiga danau dengan air terjun. Sicike-cike juga memiliki aneka flora dan fauna langka yang masih perlu diteliti sebagai tempat penelitian/edukasi. Jika dikelola dan dikemas serta dipromosikan dengan baik, niscaya akan mampu menggaet wisatawan untuk berkunjung yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat".



Danau Sicike-cike, destinasi wisata baru di Dairi

Pemerintah Kabupaten Dairi mulai membangun dan membenahi destinasi wisata baru, diantaranya Taman Wisata Alam (TWA) Danau Sicike-cike, Kecamatan Parbuluan. TWA yang masuk dalam wilayah hutan lindung dengan luasan ratusan hektar tersebut, digadang-gadang sebagai destinasi wisata potensial yang dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dihadapan para awak media, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemkab Dairi, Ir. Samuel Tua Manik menyampaikan rencana pengembangan potensi Danau Sicike-cike.

“Kedepan diharapkan TWA Sicike-cike dapat memberikan

kontribusi peningkatan pengunjung maupun wisatawan sekaligus pendapatan asli daerah dan masyarakat setempat,” kata Samuel dalam jumpa pers bertempat di Aula Balitbangda Sidikalang, Selasa (06/11/18).

“Strategi pengembangan dengan mempertahankan dan memperkuat konsep fungsi TWA Sicike-cike sebagai hutan adalah dalam rangka konservasi Sumber Daya Alam”, jelas Samuel. Untuk itu peningkatan infrastruktur sebagai aksesibilitas menuju dan didalam kawasan objek wisata menjadi suatu keniscayaan.

“Peningkatan aksesibilitas di Sicike-cike berupa infrastruktur jalan dan sarana prasarana transportasi, meningkatkan amenities, WC/toilet, pengelolaan sampah, informasi dan publikasi, parkir serta mendorong tumbuhnya usaha akomodasi dan kuliner diluar area,” jelasnya.

“Selain infrastruktur, memperkuat nilai-nilai budaya Pakpak dengan nilai historis juga penting, yaitu dengan munculkan ornamen, arsitektural, ritual, seni musik tradisional dan meningkatkan publikasi/promosi wisata serta menjadikan paket wisata TWA Sicike-cike satu paket tujuan wisata terpadu bersama dengan TWI Sijinjo dan Tao Silalahi”, jelas Samuel.

Ditempat yang sama, Marulak Situmorang, Kabid Pariwisata ikut menyampaikan, agar seluruh stakeholder pariwisata Kabupaten Dairi dapat mensinkronkan ataupun mensinergikan program dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPPARDA) tahun 2019 sebagai patron, arah dan petunjuk pengembangan kepariwisataan Kabupaten Dairi khususnya TWA Sicike-cike.



Kunker Perdana Gubernur Sumut di Pulau Nias

Gunung Sitoli, Sumut (sb1)

Selain karena keindahannya dan pesona selancar ombaknya yang sangat dikagumi turis mancanegara, Pulau Nias sebagai pulau terluar disebelah Barat Pulau Sumatera, memiliki peran penting sebagai benteng pertahanan untuk wilayah Sumatera Utara (Sumut) secara khusus dan Indonesia pada umumnya. Untuk menunjang peran penting ini, sangat perlu untuk memastikan kemajuan pembangunan untuk mensejahteraan warga Nias.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat beramah tamah dengan para bupati/walikota dan forkopimda se-Kepulauan Nias di ruang VIP Bandar Udara Binaka Gunungsitoli Pulau Nias, Rabu (31/10/2018).

“Saat ingin merebut suatu daerah, pulau terluar itu, yang lebih dahulu dimasuki dan dikuasai. Jadi harus kita jaga dan majukan bersama Nias ini, agar kuat benteng pertahanan kita dan mudah kita menata yang lain-lainnya di Sumut ini,” kata

Edy Rahmayadi.

Edy menyayangkan kabar-kabar tentang banyaknya orang asing yang berdatangan ke Nias dan mulai menguasai pulau-pulau di Nias. Kedatangan orang asing ini, kata Edy, dipicu oleh potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan keindahan daerah wisata di Nias.

“Orang luar saja menyadari betapa kayanya Nias ini. Luar biasa Nias ini, surga kecil di Sumut. Ada yang salah dengan kita kalau tidak bisa kita buat maju Nias ini, padahal semua tersedia di sini. Ayo, sama-sama kita, bantu saya para pemerintah daerah untuk memajukan Nias ini,” ujar Edy bersemangat.

Dalam kunjungan kerjanya ke Nias, diantaranya untuk membuka open tournament sepakbola PSSI dan pertemuan dengan kepala sekolah SMK se-Kepulauan Nias.

Edy juga mengatakan akan mengadakan pertemuan forkopimda dan OPD se-Kepulauan Nias untuk membahas strategi dan rencana-rencana pembangunan di Nias. Termasuk beberapa diantaranya masalah pendidikan, pertanian, infrastruktur, dan pengendalian penduduk.

Sementara itu, Bupati Nias Barat Faduhusi Daely SPd mewakili Forkopimda lainnya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Gubernur Edy Rahmayadi dan OPD Pemprov Sumut yang turut hadir.

“Selamat datang untuk bapak gubernur di Nias. Kita manfaatkan kehadiran gubernur di tengah-tengah kita, untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dalam upaya membangun Nias,” tuturnya.

Turut mendampingi Gubernur antara lain Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Sumut Arsyad Lubis, Kepala Dinas Pertanian Pemprov Sumut Azhar Harahap, Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Sumut Kodrat Shah, anggota DPRD Nias, OPD dan Forkopimda Nias.



Bursa Inovasi Desa di Deli Serdang

Bursa Inovasi Desa Kabupaten Deliserdang, secara resmi dibuka oleh Bupati Deli Serdang H Ashari Tambunan Selasa (30/10) di Gedung Balairung kota Lubuk Pakam ditandai dengan pemukulan Gong.

Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Deli Serdang ini dihadiri seluruh Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LKMD, Tim Pengelola Inovasi Desa, Tenaga Ahli, Pendamping Desa se Kabupaten Deli Serdang.

Juga dihadiri Staf Khusus Kementerian Desa Dita Indah Sari, Kepala Dinas PMD Sumut Aspan Sofian, Ketua TP PKK Ny Hj Yunita Ashari, Unsur FKPD Deliserdang, para Asisten, Pimpinan OPD dan Camat se Deli Serdang.

Bupati Deli Serdang H Ashari Tambunan pada kesempatan itu

menyampaikan bahwa desa memiliki faktor kekuatan yang positif, karena memiliki sumber daya alam yang dapat dikelola melalui pemanfaatan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia serta dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat.

Kesemuanya ini, tentunya hanya dapat diwujudkan melalui perencanaan yang baik, program yang terorganisir berkesinambungan dan akuntabel.

Bupati juga menyampaikan bahwa kehadiran Bursa Inovasi Desa ini sebagai wadah atau forum penyebaran dan pertukaran informasi agar merangsang munculnya inisiatif yang akan melahirkan berbagai Inovasi di desa.

“Kehadiran Bursa Inovasi Desa sebagai wadah atau forum penyebaran dan pertukaran informasi, dirasakan selama ini mampu merangsang munculnya inisiatif yang melahirkan berbagai inovasi, yang selanjutnya dituangkan dalam praktek penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di desa”, ujar Bupati Ashari Tambunan.

“Untuk itu, guna mempercepat proses pemahaman dan pelaksanaan pembangunan di desa, maka diperlukan langkah-langkah nyata, salah-satunya adalah dengan pola inovasi kegiatan, praktik-praktik cerdas atau pengetahuan dalam investasi dana di desa dan kegiatan-kegiatan lainnya melalui penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa seperti yang kita laksanakan pada hari ini”, lanjutnya.

Staf Khusus Kementerian Desa Dita Indah Sari dalam sambutannya mengatakan bahwa prioritas dana desa 2018 adalah Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia sekaligus juga menyampaikan rasa bangganya kepada Desa-desa di Deli Serdang yang penyerapan anggarannya bagus.

“Prioritas Dana Desa 2018 adalah Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia, untuk pembangunan SDM diprioritaskan ke Ibu-ibu dan perempuan, dan Kabupaten Deliserdang ini ternyata penyerapan anggaran Desanya Top, tidak pernah ada warna kuning

ataupun merah”, ujar Dita Indah Sari mengakhiri sambutannya.